

ABSTRAK

Pemberdayaan merupakan tugas yang di emban oleh pemerintah, pemberdayaan dilakukan untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar mereka memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan potensinya. Dengan basis kemandirian lokal serta adanya peran dari pemerintah, maka diharapkan terjadi sinergi yang positif dan berkesinambungan untuk keluar dari gejolak-gejolak sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Umkm Kuala Tungkal. Adapaun hasil dari penelitian bahwa strategi pengelolaan resiko permasalahan saat penyelenggaraan pendampingan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang mereka terapkan telah memberikan hasil yang positif dan berkelanjutan dalam mengelola resiko permasalahan secara efektif. Berdirinya dinas ini secara hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan disempurnakan melalui Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Secara umum, program-program Diskoperindag Tanjung Jabung Barat telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kuala Tungkal. Peningkatan kapasitas pelaku, kemudahan akses pembiayaan, dan perluasan pasar adalah indikator utama keberhasilan pemberdayaan. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keselamatan dan keberhasilan pendampingan UMKM. Mereka mengambil langkah proaktif dengan mengidentifikasi dan menganalisis resiko permasalahan potensial sebelum pendampingan dimulai.

Kata kunci : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemberdayaan, UMKM

ABSTRACT

Empowerment is a responsibility entrusted to the government, aimed at supporting and enabling communities to realize their full potential. With a foundation of local self-reliance and the active involvement of the government, it is expected that a positive and sustainable synergy can be established to overcome socio-economic challenges. This study aims to analyze the role of the Department of Cooperatives, Industry, and Trade in the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kuala Tungkal. The results indicate that the strategies employed by the department in managing risks during the implementation of MSME assistance programs have been effective and sustainable. The department takes proactive measures by identifying and analyzing potential problems before the program execution, which contributes to minimizing disruptions and ensuring successful implementation. The legal basis for the establishment of the department is outlined in Regional Regulation of Tanjung Jabung Barat Regency Number 6 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatuses, which was refined through Regent Regulation Number 55 of 2018. Overall, the programs carried out by the department have had a significant positive impact on MSME development in Kuala Tungkal, particularly in enhancing entrepreneurial capacity, improving access to capital, and expanding market reach. The findings demonstrate the department's strong commitment to MSME empowerment and its role in fostering local economic growth.

Keywords: *Department of Industry and Trade, Empowerment, MSMEs*